

Analisis dan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah di Kabupaten Grobogan

Nicolaus Benny S¹, Retno Tri Hastanti², A Rismiari³
^{1,2} Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan

Abstract. Experience shows that there is one requirement needed to support the success of economic development in a region. This requirement is the solid understanding of the local government regarding the meaning of indicators and development variables as the basis for planning and evaluating policies taken by the central and regional governments. This adequate understanding will have a positive impact in the form of increasingly focused development implementation (including planning, implementation, supervision, and control activities) and an increasingly high community response in making development a success by trying to contribute to realizing the targeted goals. It is realized that in order to ensure the sustainability of economic development in the long term, it is very important to know the current conditions regarding the overall development of the region's economy as a reference in estimating future economic conditions.

Keywords: Economy, Region, Indicators.

Abstrak. Pengalaman memperlihatkan bahwa terdapat satu syarat yang diperlukan dalam mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Syarat tersebut adalah mantapnya pemahaman pemerintah setempat terkait makna indikator dan variabel-variabel pembangunan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi dari kebijakan yang diambil pemerintah pusat maupun daerah. Pemahaman yang memadai ini akan membawa dampak positif berupa semakin terarahnya penyelenggaraan pembangunan (termasuk di dalamnya kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian) dan semakin tingginya respon masyarakat dalam menyukseskan pembangunan dengan berupaya berkontribusi mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan.

Disadari bahwa untuk menjamin keberlangsungan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang, maka sangat penting untuk mengetahui kondisi terkini mengenai perkembangan ekonomi wilayah secara menyeluruh sebagai referensi dalam memperkirakan kondisi perekonomian di masa mendatang.

Kata kunci: Ekonomi, Daerah, Indikator.

LATAR BELAKANG

Secara umum, pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha untuk menaikkan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan mendasar dalam struktur ekonomi suatu wilayah dan pemerataan pendapatan bagi penduduk di wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi memiliki tiga sifat. Pertama, pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Setiap wilayah harus mengalami tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Kedua, pembangunan ekonomi berupaya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang ada di suatu wilayah untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Ketiga, upaya peningkatan pendapatan per kapita ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Artinya suatu perekonomian dapat dinyatakan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjang cenderung

meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan per kapita harus mengalami kenaikan terus-menerus.

Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi, cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, dan mengalami kontraksi yang cukup signifikan pada tahun 2020 seiring pandemi Covid-19 melanda di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia, meskipun kontraksi ini relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan di level provinsi maupun level nasional.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Grobogan berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selama periode waktu 2019-2021, IPM Kabupaten Grobogan juga mengalami peningkatan secara konsisten. Pada tahun 2019, capaian IPM Kabupaten Grobogan sebesar 69,868. Capaian ini meningkat sebesar 0,55 hingga tahun 2021 menjadi 70,41. Akan tetapi capaian ini masih lebih rendah dari IPM Provinsi yaitu 72,16 pada tahun 2021.

Bagi Kabupaten Grobogan sendiri, pembangunan ekonomi ini sangat penting mengingat begitu besarnya keinginan untuk terlepas dari kemiskinan yang selama ini masih relative tinggi di wilayah ini, yaitu sebesar 12,74% per Maret 2021 atau sebesar 175,72 ribu orang, mengalami kenaikan jika dibanding Maret 2020 sebesar 12,46 % atau sekitar 172,26 ribu orang.

Dari data-data tersebut menunjukkan bahwa diperlukan upaya untuk mengembangkan perekonomian Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan potensi yang ada. Oleh karenanya diperlukan kajian mendalam untuk menentukan sector-sektor yang harus dioptimalkan agar dapat menjadi input bagi pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Kajian yang dimaksud menyajikan prediksi perkembangan perekonomian secara detail pada setiap aspek. Aspek yang dilihat bukan hanya aspek ekonomi, akan tetapi aspek non-ekonomi yang mempengaruhi perekonomian daerah seperti IPM, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Kebutuhan akan ketersediaan beberapa indikator ekonomi daerah tersebut menuntut Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk melakukan penyusunan indikator ekonomi daerah. Melalui penyusunan indikator ekonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat menentukan prioritas pembangunan baik secara sektoral maupun secara kewilayahan.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah selalu menghadapi tantangan disebabkan berbagai factor ekonomi maupun non ekonomi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi upaya pembangunan tersebut. Pada awalnya pembangunan diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu upaya pembangunan ekonomi diarahkan pada upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi sehingga memunculkan teori-teori pertumbuhan klasik, neoklasik maupun teori pertumbuhan baru/teori pertumbuhan endogen (Todaro & Smith 2012). Teori-teori pertumbuhan ekonomi yang diperkenalkan oleh para ekonom menemukan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi di negara berkembang maupun negara maju bergerak di atas empat roda/faktor pertumbuhan ekonomi yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, pembentukan capital dan teknologi (Samuelson, 1995). Hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik yang menyimpulkan bahwa laju tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai suatu negara tergantung kepada tingkat perkembangan teknologi, peranan modal dan peranan tenaga kerja dalam menciptakan pendapatan negara (Sukirno, 1985).

Menurut Lincolin Arsyad (1999) tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Pertumbuhan PDB yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dengan kata lain bahwa apa yang disebut dengan “trickle down effects” dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan. Apabila tidak ada pemerataan maka yang akan menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi ini adalah masyarakat yang mempunyai modal yang besar dan masyarakat dari golongan atas. Selama proses awal pembangunan terjadi suatu dilema yaitu antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan, ini menjadi masalah yang telah lama dan harus dihadapi oleh negara-negara miskin dan berkembang. Trade off atau pertukaran antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan di masing-masing daerah selalu terjadi. Kuznet telah mengemukakan bahwa pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, dengan kata lain ketimpangan yang tinggi. Namun, pada tahap-tahap berikutnya hal tersebut akan membaik. Hipotesis ini dikenal dengan hipotesis “U-Terbalik” Kuznet. Sesuai dengan rangkaian perubahan kecenderungan distribusi pendapatan dengan ukuran koefisien Gini dan pertumbuhan PDB perkapita yang akan terlihat seperti kurva yang berbentuk huruf U terbalik.

Menurut Kuznet distribusi pendapatan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000). Perbedaan mendasar antara negara berkembang dan negara maju terletak pada akumulasi modal yang bersumber dari sisa pendapatan yang tidak dikonsumsi. Hal ini terkait dengan rendahnya pendapatan di negara berkembang sehingga aliran capital dariluar negeri baik yang berasal dari investasi asing maupun hutang luar negeri menjadi salah satu sumber akumulasi capital yang penting. Kebanyakan negara berkembang hanya mempunyai tabungan dan investasi sebesar 2% sampai 6% dari pendapatan nasionalnya, sedangkan tabungan dan investasi negara maju selama periode pertumbuhan yang cepat mencapai 10% sampai 20% dari pendapatan nasionalnya (Irawan dan Suparmoko, 1992). Akan halnya tenaga kerja, Batiz & Batiz (1994) menyatakan bahwa seringkali teknologi dan capital telah tersedia dalam jumlah yang relative tetap, sehingga jumlah output yang dihasilkan dalam suatu perekonomian sangat tergantung pada tenaga kerja. Penduduk sebagai sumber tenaga kerja memiliki fungsi ganda dalam perekonomian, yaitu sebagai konsumen/pasar apabila dilihat dari sisi permintaan serta tenaga kerja atau produsen apabila dilihat dari sisi penawaran.

Menurut Sjafrizal (2009) terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah sangat penting untuk mempercepat realisasi pembangunan di daerah. Namun koordinasi antar kepala daerah kurang berjalan efektif bahkan kerap dihadapi konflik kepentingan dalam penyusunan dan pelaksanaan program. Masing-masing kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota memiliki ego sektoral sehingga terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dalam kondisi demikian, dibutuhkan pemetaan akan kebutuhan dari masing-masing wilayah sehingga pembangunan dapat dilakukan secara terpadu dan proporsional. Ada baiknya jika antar kepala daerah menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah sesuai masa jabatan kepala daerah. Sinkronisasi dan integrasi juga harus rencana strategis yang jelas dan terarah dan mewakili semua kepentingan wilayah

Keberhasilan pembangunan tersebut bagaimanapun perlu diukur dengan menggunakan indikator baik sosial maupun ekonomi yang dapat diterima secara umum serta mampu mendeskripsikan kondisi riil di lapangan. Indikator yang umum digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi adalah angka-angka PDRB, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan kondisi sosial kemasyarakatan di bidang pendidikan dan kesehatan. Meskipun pendapatan masih merupakan indikator yang paling banyak digunakan sebagai ukuran pertumbuhan output (Frumkin, 1990), validitas indikator konvensional ini masih diperdebatkan. Perdebatan yang terjadi berkaitan dengan bagaimana keterkaitan kemajuan ekonomi ini dengan kemajuan yang lebih luas dalam hal

moral, kemanusiaan dan sosial. Ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya diciptakan dengan biaya lingkungan dan kemanusiaan yang tinggi (Froyen, 1996). Untuk itu badan-badan dunia seperti PBB dan Bank Dunia memperkenalkan indikator-indikator tambahan selain indikator ekonomi. indikator sosial yang biasanya digunakan berkaitan dengan pendidikan, kesehatan serta lingkungan.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pendapatan masyarakat diperoleh melalui proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (Sukirno, 2006). Untuk memahami dan melakukan limitasi terhadap pembahasan pertumbuhan ekonomi, perlu memahami tentang operasionalisasi dari teori pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Secara garis besar, teori pertumbuhan ekonomi dapat dimaknai sebagai penjelasan dari faktor-faktor ekonomi yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, serta melihat interaksi faktor-faktor tersebut yang menyebabkan terjadi proses pertumbuhan.

Dalam teori Rostow dijelaskan bahwa modernisasi kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi merupakan proses yang bertahap. Proses pembangunan bersifat universal dengan tahap-tahap yang sama dan linier. Pertumbuhan ekonomi menurutnya bisa dilihat kondisi masyarakat dalam menjalani pola kehidupannya. Secara garis besar, Rostow membuat distingsi antara pola tradisional dan kapitalis modern. Dalam hal melakukan pra-kondisi untuk meningkatkan ekonomi di suatu wilayah, penekanannya terdapat pada keseluruhan proses dimana masyarakat berkembang. Pembentukan tahapan ini berguna untuk melakukan identifikasi variabel-variabel kritis atau strategis yang dianggap dapat mengangkat sebuah wilayah ke derajat perubahan dan perpindahan menuju tahapan baru yang lebih berkualitas.

Rostow membagi tahap pembangunan ekonomi menjadi 5 tahap yaitu: (1) masyarakat tradisional (The Traditional Society); (2) prasyarat untuk tinggal landas (The Preconditions For Take - Off); (3) tinggal landas (The take - off), (4) menuju kedewasaan (The Drive to Maturity), dan (5) masa konsumsi tinggi (The Age of High Mass - Consumption).

Sementara itu, teori pertumbuhan ekonomi berimbang yang diperkenalkan oleh Rosentrain-Rodan, Ragnar Nurske, dan Arthur Lewis menyatakan bahwa Investasi yang dilakukan berjalan secara lambat untuk menyesuaikan dengan sektor lainnya. Doktrin ini menjelaskan bahwa perlu penekanan terhadap titik imbang antara industri barang konsumen, dan antara barang konsumen dengan industri barang modal. Hal ini juga berarti harus terjadinya keseimbangan antara industri, sektor pertanian, sektor dalam negeri, dan sektor ekspor. Singkatnya teori pertumbuhan berimbang mengharuskan adanya pembangunan serentak dan harmonis dari berbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor tumbuh bersama.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari berbagai sektor yang saling memiliki keterkaitan dan berfungsi meningkatkan daya tawar barang. Hal ini meliputi pembangunan serentak dan harmonis dari barang setengah jadi, bahan mentah, tenaga, pertanian, pengairan, angkutan dan lain-lain, serta semua industri yang memproduksi barang konsumen. Sebaliknya, sisi permintaan berhubungan dengan penyediaan kesempatan lapangan kerja yang lebih besar dan penambahan penghasilan agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh di pihak penduduk. Sisi ini berkaitan dengan industri yang sifatnya saling melengkapi, industri barang konsumen, khususnya pertanian, dan industri manufaktur. Jika semua industri dibangun secara serentak maka jumlah tenaga yang terserap akan sangat besar. Dengan cara ini akan tercipta barang-barang dari masing-masing industri satu sama lain, dan semua barang akan menjadi habis terjual. Secara tidak langsung akan terjadi spesialisasi di semua sektor yang dilaksanakan secara serentak, sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi yang bernilai cukup signifikan.

Indikator Ekonomi Daerah

Secara umum, indikator makro ekonomi adalah petunjuk yang memberikan indikasi tentang suatu keadaan makro ekonomi. Indikator makro ekonomi juga merupakan refleksi dari suatu keadaan makro ekonomi. Selain itu, indikator makro ekonomi juga dapat menjadi penolong dalam mengukur perubahan makro ekonomi. Indikator makro ekonomi adalah statistik yang digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi saat ini dan saat yang akan

datang. Statistik tersebut diterbitkan secara periodik (umumnya harian, bulanan, dan tahunan) oleh pemerintah, lembaga-lembaga ataupun organisasi-organisasi swasta. Indikator makro ekonomi tersebut dipublikasikan berdasarkan atas pengamatan terhadap industri-industri, wilayah/daerah, ataupun negara. Fungsi utama indikator makro ekonomi adalah untuk menganalisis perkembangan ekonomi saat ini dan untuk memprediksi perkembangan ekonomi di masa yang akan datang. Fungsi lain dari indikator makro ekonomi adalah untuk mengatur atau mengubah ekspektasi pasar. Oleh sebab itu, indikator makro ekonomi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja, pasar valuta asing, pasar saham, dan pasar bursa berjangka.

Indikator makro ekonomi yang umum dipublikasikan di Indonesia adalah produk domestik bruto (PDB) dan PDRB, indeks harga konsumen (IHK), hutang pemerintah, nilai tukar, neracatransaksi berjalan, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan cadangan devisa. Indikator-indikator tersebut dipublikasikan oleh Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF), Badan Pusat Statistik, dan Bank Indonesia.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dimaknai sebagai terjadinya peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam melakukan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam jangka waktu tertentu (Mankiw, 2007). Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator ekonomi makro digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara. Pada dasarnya aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Suatu wilayah mengalami pertumbuhan secara ekonomi bila terjadi peningkatan kapasitas produksi dari semua kegiatan ekonomi di dalam wilayahnya secara terukur. Selama beberapa dekade, pembangunan daerah selalu berupaya memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tanpa melihat apakah pertumbuhan tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan penduduk secara merata atau tidak. Perkembangan selanjutnya, para pengambil kebijakan pembangunan daerah mulai memperhitungkan manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, sehingga tingkat pemerataan mulai menjadi suatu indikator bagi kesejahteraan.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja dan berpihak pada penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara berkesinambungan. Kesempatan kerja yang semakin luas akan meningkatkan serapan tenaga kerja sehingga menjadi faktor penting dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi indikator semakin tingginya pendapatan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan menjadi semakin berkurang.

Sektor Basis

Teori ekonomi basis menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari suatu daerah. Proses produksi di sektor industri suatu daerah yang menggunakan sumber daya produksi lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku, dan outputnya diekspor akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, dan penciptaan peluang kerja di daerah tersebut (Tambunan, 2001).

Teknik Location Quotient (LQ) banyak digunakan untuk membahas kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian atau mengukur konsentrasi relatif kegiatan ekonomi untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan sektor unggulan sebagai leading sektor suatu kegiatan ekonomi. Dalam prakteknya, penggunaan pendekatan LQ meluas tidak terbatas pada bahasan ekonomi saja melainkan juga dimanfaatkan untuk menentukan sebaran komoditas atau melakukan identifikasi wilayah berdasarkan potensinya. Teknik LQ relevan digunakan sebagai metode dalam menentukan komoditas unggulan khususnya dari sisi penawaran (produksi atau populasi). Komoditas yang berbasis lahan seperti tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, perhitungannya didasarkan pada lahan pertanian (areal tanam atau areal panen), produksi atau produktivitas. Komoditas pertanian yang tidak berbasis lahan seperti usaha ternak, dasar perhitungannya digunakan jumlah populasi (Rochmat Hendayana, 2003).

Teori basis ekspor (export base theory) adalah merupakan bentuk model pendapatan regional yang paling sederhana. Teori ini sebenarnya tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari ekonomi makro inter-regional, karena teori ini menyederhanakan suatu sistem regional menjadi dua bagian, yakni daerah yang bersangkutan dan daerah-daerah selebihnya. Walaupun teori basis mengandung kelemahan-kelemahan, namun sudah banyak studi empirik yang

dilakukan dalam rangka usaha memisahmisahkan sektor-sektor basis dari sektor-sektor bukan basis suatu daerah.

Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus Sukirno (2004). Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono,2000). Bahkan mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidak bersamaan. Kenaikan harga barang yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang cukup besar dan terus-menerus, bukanlah merupakan inflasi (Nopirin, 2000). Dari kutipan di atas diketahui bahwa inflasi adalah keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan (Excess Demand) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan. Inflasi sebagai suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat. Naiknya biaya produksi yang meningkat juga dapat menyebabkan inflasi yang biasa disebut dengan cost push inflation dan inflasi yang berasal dari naiknya harga impor secara keseluruhan yang disebut sebagai imported inflation.

Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk nasional. Efek terhadap distribusi pendapatan disebut dengan equity effect, sedangkan efek terhadap alokasi faktor produksi dan pendapatan nasional masingmasing disebut dengan efficiency dan output effects (Nopirin, 2000).

Ketenagakerjaan

Memahami konsep ketenagakerjaan sangat penting untuk dapat melakukan identifikasi penduduk ke dalam beberapa golongan ketenagakerjaan seperti, kelompok angkatan kerja, bukan angkatan kerja, bekerja, atau pengangguran. Untuk itu memang diperlukan pembedaan yang tegas untuk memahami konsep-konsep tersebut beserta dengan turunan konsepnya. Untuk itu gambar dibawah ini dapat memberikan perbedaan antar konsep tersebut. Secara garis besar penduduk dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utamanya, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi lebih berarti jika diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kegiatan perekonomian yang bermuara pada orientasi pemerataan akan mengurangi masalah kemiskinan. Tujuan dari pembangunan daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan yang merata, maka diharapkan akan mengurangi masalah kemiskinan. Di dunia ilmiah, masalah kemiskinan ini telah banyak ditelaah oleh para ilmuwan sosial dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dengan menggunakan berbagai konsep dan ukuran untuk menandai berbagai aspek dari permasalahan tersebut.

Kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta ketrampilan; dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi kemiskinan tersebut terwujud dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Pengangguran

Pengangguran terbuka adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan, atau tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha, atau tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (BPS, 2016).

Berdasarkan alasan menganggur, terdapat beberapa jenis pengangguran: (1) pengangguran friksional, yakni pengangguran yang disebabkan oleh perputaran normal tenaga kerja; (2) pengangguran struktural, yakni pengangguran yang disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara struktur penawaran tenaga kerja dengan struktur permintaan tenaga kerja; dan (3) pengangguran siklis, yakni pengangguran yang disebabkan oleh siklus bisnis yang mengalami periode resesi (Lipsey, 1995). Sukirno (2006) menyatakan bahwa efek buruk dari pengangguran adalah berkurangnya tingkat pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran atau kesejahteraan.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana suatu negara (wilayah) telah menggunakan sumber daya penduduknya untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga negara (wilayah) tersebut. Isu yang kemudian berkembang adalah keberhasilan meningkatkan prestasi ekonomi suatu negara atau wilayah ke tingkat yang lebih tinggi tidak selalu diikuti oleh meningkatnya mutu kehidupan masyarakatnya.

Penyusunan IPM didasarkan pada tiga komponen utama, yaitu angka harapan hidup (e0), pencapaian pendidikan, yang diukur dengan angka harapan lama sekolah (AHS) dan rata-rata lama sekolah (MYS), serta daya beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP). Penggunaan komponen-komponen tersebut mengikuti pembakuan komponen yang dilakukan oleh UNDP. Dengan demikian sejauh mungkin hasilnya dapat dibandingkan di tingkat internasional, nasional maupun daerah.

METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan salah satu unsur yang penting dalam melakukan suatu kajian ataupun penelitian. Sedangkan penelitian merupakan aktifitas yang seksama dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data yang tersistematis dan tentunya bersifat objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu kesimpulan sementara. Adapun metodologi kegiatan ini yang digunakan terdiri dari kerangka pemikiran, jenis dan sumber data yang dikumpulkan dan kemudian digunakan, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Metode Analisis

Indikator makro ekonomi yang dikaji dalam indikator makro ekonomi yang dianalisis adalah PDRB berdasarkan lapangan usaha dan pengeluaran, PDRB Per Kapita, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pengangguran, kemiskinan dan distribusi pendapatan, sektor basis, derajat desentralisasi fiskal daerah, rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah dan indeks pembangunan manusia. Indikator makro ekonomi yang baik memiliki beberapa ciri, yakni: sahih (valid), objektif, sensitif, dan spesifik. Sahih (valid) artinya indikator makro ekonomi tersebut dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya. Objektif artinya untuk hal yang sama indikator makro ekonomi memberikan hasil yang sama pula walaupun dipakai oleh orang yang berbeda pada waktu yang berbeda. Kemudian sensitif artinya indikator

makro ekonomi tersebut mampu mendeteksi perubahan sekecil apapun. Terakhir, spesifik artinya indikator makro ekonomi tersebut hanya mengukur perubahan situasi yang dimaksud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Jumlah Guru terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Nilai koefisien regresi variabel Jumlah Guru (X1) sebesar 0,001 dalam korelasi yang positif dan signifikan artinya setiap kenaikan jumlah guru atau tenaga pendidikan 1% maka akan menyebabkan kenaikan IPM sebesar 0,001% dengan asumsi faktor lain tetap (*ceteris paribus*). Nilai koefisien yang relatif cukup kecil, menunjukkan bahwa meskipun pengaruhnya signifikan tetapi dampak jumlah guru terhadap IPM Kabupaten Grobogan relatif sangat kecil. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan siswa, yang dihitung berdasarkan angka rata-rata lama sekolah, maka fokus kebijakan pemerintah daerah lebih diupayakan bukan untuk meningkatkan jumlah guru, melainkan pula pada peningkatan kualitas sumber daya guru.

Pendidikan guru yang lebih baik akan dapat mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada siswa dengan lebih baik dan efektif, apalagi di era yang tingkat perubahan makin tinggi, kualitas pendidikan yang kurang baik dapat menyebabkan peserta didik maupun lulusan sulit beradaptasi dengan perkembangan zaman yang begitu cepat karena yang diajarkan di dunia pendidikan yang ditempuh kurang efektif. Sebaliknya, pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik juga, inovasi-inovasi baru secara otomatis juga akan bermunculan, masalah demi masalah bangsa Indonesia sedikit demi sedikit akan teratasi. Tenaga pendidik yang profesional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan perilaku) yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kompetensi pedagogik juga harus dimiliki oleh guru agar dalam proses pembelajaran seorang guru dapat mengelola pembelajaran secara efektif dan efisien.

Berdasarkan data yang ada, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Grobogan adalah 7,11, artinya belum lulus SMP atau sederajatnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa program pemerintah Pendidikan 12 tahun belum tercapai di wilayah ini. Banyak faktor tentunya yang berpengaruh pada rata-rata lama sekolah, yang salah satunya adalah Sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah tenaga pendidik atau guru, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil estimasi dapat dijelaskan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi (X2) memiliki koefisien sebesar 0,39. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat memiliki hubungan positif dan signifikan secara statistik terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Grobogan.

Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya pertumbuhan output perkapita. Perekonomian dianggap mengalami kenaikan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya dan indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhannya ekonomi yaitu tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita masyarakat juga akan meningkat, sehingga IPM juga akan mengalami peningkatan. Pendapatan daerah yang semakin tinggi, harapan untuk pembukaan kapasitas produksi baru semakin besar, sehingga akan menyerap tenaga kerja baru. Pendapatan yang tinggi terlihat dari tingginya pendapatan perkapita, secara positif dan berarti. Dengan begitu semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka pendapatan perkapita masyarakat juga akan naik sehingga mendorong meningkatnya IPM.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) direspon oleh peningkatan indeks pembangunan manusia. Hal demikian terjadi karena meningkatnya PDRB mampu menambah sumber daya ekonomi yang diperlukan dalam pembangunan manusia, utamanya dalam bentuk peningkatan pendapatan perkapita. Ketika pendapatan perkapita mengalami kenaikan maka penduduk memiliki pilihan-pilihan yang lebih luas untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya sehingga pembangunan manusia dapat berlangsung lebih optimal. Menurut Todaro (2011) dengan pendapatan yang lebih tinggi maka warga dan pemerintah dapat mengeluarkan dana yang lebih besar untuk kepentingan pendidikan, dan dengan pendidikan yang lebih baik produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi akan mudah tercapai. Dengan demikian, maka dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Grobogan adalah pertumbuhan ekonomi yang Inklusif.

Analisis Sarana Pendidikan dengan Indeks Pembangunan Manusia

Nilai koefisien regresi variabel sarana prasarana di bidang pendidikan diperoleh sebesar 0,127 dalam korelasi yang positif dan signifikan artinya setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan 1% maka akan menyebabkan kenaikan IPM sebesar 0,127% dengan asumsi faktor lain tetap (*ceteris paribus*). Pendidikan merupakan salah satu tujuan pembangunan yang mendasar, pendidikan bersifat esensial bagi kehidupan yang memuaskan dan berharga serta fundamental kaitannya dengan gagasan lebih luas mengenai peningkatan kapabilitas manusia sebagai inti makna pembangunan yang sesungguhnya. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah daerah terhadap sarana prasarana pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Investasi pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan pembangunan manusia sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dapat tercapai.

Infrastruktur pendidikan ini akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Salah satu angka penentu Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks tingkat pendidikan masyarakat yang tercermin dari Rata-rata Lama Sekolah. Dengan angka rata-rata lama sekolah 7,11 maka jumlah sarana prasarana di bidang pendidikan, termasuk belanja pemerintah didalamnya, baik yang dibelanjakan untuk peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan, maupun upaya peningkatan terhadap sumber daya manusianya, belum mampu menunjukkan kinerja yang cukup baik, yaitu dalam upaya peningkatan angka rata-rata lama sekolah (program wajib belajar pemerintah pusat adalah 12 tahun, artinya minimal Pendidikan masyarakat adalah tingkat SLTA). Artinya upaya pemerintah daerah memperbesar alokasi dana untuk sektor pendidikan nampaknya belum mampu memenuhi kebutuhan nyata yang ada di lapangan. Kondisi ini makin memperkuat pendapat dari berbagai pihak bahwa pembangunan di bidang pendidikan tidak bisa hanya dibebankan kepada kemampuan pemerintah daerah semata. Peran serta masyarakat dalam pembiayaan maupun substansi pembangunan di bidang pendidikan sangat diperlukan. Di sisi lain menunjukkan investasi di bidang pendidikan masih harus mendapat perhatian untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah khususnya dari alokasi belanja pemerintah pusat.

Alokasi belanja Pendidikan yang dikelola dengan baik dapat menjadi faktor penting bagi pembangunan manusia karena adanya kepastian sumber daya manusia yang potensial. Hal ini karena investasi publik di sektor pendidikan dapat meningkatkan kualitas modal manusia yang akan meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan. Komposisi pengeluaran pendidikan antara pendidikan dasar dan menengah merupakan faktor penentu dari status pendidikan penduduk, terutama di negara-negara berkembang. Lazimnya di negara berkembang seperti Indonesia, khususnya investasi dalam pendidikan dasar dapat memiliki efek positif langsung pada hasil pendidikan melalui pengurangan buta huruf dan akses terhadap pelayanan sosial masyarakat.

Analisis Sarana Prasarana Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Nilai koefisien regresi variabel sarana prasarana sektor kesehatan diperoleh sebesar 0,019 dalam korelasi yang positif dan signifikan, artinya setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan 1% maka akan menyebabkan kenaikan IPM sebesar 0,019 % dengan asumsi faktor lain tetap (*ceteris paribus*). Kondisi ini masuk akal karena sarana prasarana Kesehatan yang merupakan belanja pemerintah daerah di bidang Kesehatan yang digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan baik berupa pembangunan Rumah sakit, Puskesmas, maupun prasarana yang lain pada gilirannya akan mempermudah akses masyarakat terhadap fasilitas Kesehatan. Dengan demikian maka tingkat Kesehatan masyarakat akan semakin membaik.

Pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan Kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat. Dengan demikian kesehatan turut serta membantu peningkatan pembangunan manusia, karena manusia yang sehat akan jauh lebih baik daripada manusia yang kurang sehat. Kesehatan yang baik akan berpengaruh pada perubahan yang baik, sebaliknya kesehatan yang buruk atau kurang baik akan berakibat pada perubahan ke arah yang kurang baik juga tentunya. Karena tanpa kesehatan masyarakat tidak akan memiliki semangat serta produktivitas

Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan bisa dalam wujud bantuan atau subsidi obat-obatan maupun vitamin terhadap balita dan ibu hamil, serta lansia, yang tentunya akan berdampak pula pada tingkat Kesehatan masyarakat. Di sisi lain bisa pula dana dari pemerintah daerah dipergunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat secara langsung dalam bidang kesehatan, sehingga para penerima manfaat akan memiliki

pengetahuan dan ketrampilan yang lebih mumpuni di bidang kesehatan. Dengan berbagai upaya pemerintah di bidang Kesehatan ini, diharapkan akan memberikan impact terhadap makin tingginya Angka Harapan Hidup masyarakat di Kabupaten Grobogan, sebagai indikator makin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan tidak hanya bertumpu pada belanja kuratif (penyembuhan) tetapi sudah ada upaya pada preventif (pencegahan). Terdapat 3 program prioritas pemerintah daerah di Indonesia yang dijalankan, yaitu: peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana layanan kesehatan, pembebasan biaya layanan kesehatan dan peningkatan kesehatan ibu dan anak. Anggaran kesehatan dari APBD pemerintah daerah antara lain digunakan untuk bantuan iuran kesehatan masyarakat tidak mampu, pembangunan baru, peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan (seperti rumah sakit, puskesmas), jaminan kesehatan daerah. Di samping itu, dialokasikan juga anggaran kesehatan pada DAK Fisik Bidang Kesehatan dengan output antara lain pengadaan kendaraan farmasi, kendaraan ambulans, pembangunan gedung kantor, pengadaan sarpras kesehatan, pembangunan puskesmas keliling, pengolahan air limbah, pengadaan alat-alat kesehatan, pengadaan obat-obatan, sepeda motor, pembangunan Balai Penyuluh KB dan sebagainya

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Grobogan berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergitas sektor-sektor ekonomi utama dengan pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, bisnis, akademisi, masyarakat, dan media. Pada sektor industri, perdagangan, informasi, komunikasi, pertanian, serta UMKM, langkah-langkah khusus seperti digitalisasi ekonomi, pengembangan SDM, dan peningkatan investasi diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi. Selain itu, kebijakan APBD diselaraskan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Sektor pertanian diprioritaskan untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, sementara dukungan terhadap UMKM diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi lokal. Peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pengelolaan aset, dan peningkatan iklim investasi merupakan langkah strategis untuk mencapai kemandirian daerah. Di bidang kesejahteraan, sinergitas antar-sektor diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,

pendidikan, dan kesehatan, dengan tujuan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Grobogan. Kontribusi masyarakat dalam pembiayaan dan pembangunan pendidikan serta kesehatan juga diharapkan dapat memperkuat capaian tersebut.

Rekomendasi

Dari serangkaian analisis yang telah dilakukan terhadap berbagai indikator ekonomi makro yang tertuang dalam bab-bab sebelumnya, maka kajian ini memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

a. Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Pengendalian inflasi di Kabupaten Grobogan perlu terus dilakukan oleh pemerintah, baik melalui kebijakan. Melalui pengendalian inflasi tersebut pemerintah akan membantu masyarakat dalam menjaga daya belinya. Konsumsi masyarakat terbukti dapat menjadi salah satu faktor penting bagi peningkatan PDRB dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan. Jika pemerintah berhasil mengoptimalkan daya beli masyarakat dan menjadikan pasar domestik sebagai jaring pengaman di dalam menyerap produk-produk khususnya hasil UMKM yang banyak tersebar di Kabupaten Grobogan maka hal itu akan dapat menjaga kontinuitas usaha dan perkembangan UMKM. Jika pertumbuhan ekonomi terus dapat terjadi di maka perkembangan usaha akan dapat terus tercipta yang akan menjadi salah satu solusi bagi persoalan penyerapan tenaga kerja, pengurangan tingkat pengangguran, peningkatan pendapatan masyarakat serta pengurangan tingkat kemiskinan secara signifikan.

Bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, upaya yang dilakukan dengan menguatkan pendapatan dan meringankan pengeluaran masyarakat melalui pemberdayaan dan penguatan sumber-sumber penghidupan, serta pemberian bantuan-bantuan social.

b. Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha yang Kondusif

Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional, diwujudkan dengan strategi Meningkatkan minat investasi dengan mendorong pemenuhan infrastruktur penunjang investasi, peningkatan kualitas pelayanan perizinan, serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi.

Pemda Kabupaten Grobogan harus terus meningkatkan pelayanan dan iklim Investasi untuk bisa memenangkan persaingan dengan daerah-daerah lain baik di kawasan Jawa Tengah ataupun di Indonesia, karena investasi menjadi salah satu faktor penting di dalam menggerakkan kegiatan ekonomi, khususnya meningkatkan kapasitas kegiatan sektor ekonomi lokal. Di samping nilai investasi yang diharapkan terus naik, yang juga perlu diperhatikan adalah pemerataan investasinya yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki Pemda Kabupaten Grobogan, meningkatkan iklim usaha semakin kondusif bagi perkembangan usaha yang lebih sehat, dan kompetitif. Melalui strategi ini didukung pengurangan ekonomi biaya tinggi melalui program reformasi komprehensif di bidang perpajakan, kepastian dan birokrasi diharapkan perkembangan usaha dapat semakin berkembang, didukung oleh penguatan produk-produk unggulan daerah yang semakin menarik, inovatif dan berdaya saing tinggi.

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kemudahan akses layanan perizinan bagi investor maupun pengusaha lokal dan pengusaha baru, salah satunya dengan membuat sebuah website atau aplikasi yang memungkinkan investor melihat potensi investasi di Kabupaten Grobogan.

- c. Penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing

Penetapan kebijakan pembangunan dan pengembangan sektor perekonomian hendaknya lebih memprioritaskan sektor unggulan yang dimiliki masing-masing sektor ekonomi. Meskipun demikian sektor lainnya (non unggulan) tetap mendapat perhatian secara proporsional sesuai dengan potensi dan peluang pengembangannya. Pengembangan sektor unggulan hendaknya diarahkan pada upaya untuk menciptakan keterkaitan antar sektor. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui penciptaan spesialisasi yang memungkinkan bergerakinya perekonomian secara bersama-sama melalui proses pertukaran komoditas antar daerah.

Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah, melalui menumbuhkan kembali geliat perekonomian masyarakat melalui optimalisasi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri, penguatan dan pemberdayaan UMKM yang didukung oleh lembaga keuangan mikro dan koperasi yang berkualitas, penguatan sektor perikanan dan pertanian secara luas, pengembangan kawasan dan sentra industri, serta pengembangan kawasan wisata berbasis masyarakat dan industri kreatif.

d. Membangun Sinergi Sektor Swasta dan Pemerintah

Kegiatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Grobogan membutuhkan dana, daya serta pemikiran yang besar. Kondisi tersebut hanya akan dapat berjalan dengan baik bilamana terjadi sinergi hubungan kemitraan yang kuat antara sektor swasta dan pemerintah. Potensi potensi besar yang dimiliki Kabupaten Grobogan tersebut akan optimal bila dapat didayagunakan melalui peran serta dan kerjasama yang baik antara sektor swasta dan pemerintah. Penguatan hubungan kemitraan antara swasta dan pemerintah yang bersinergi akan efektif bilamana ada kesamaan visi antar stakeholders Kabupaten Grobogan dalam mendorong kegiatan ekonomi daerah menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (1999). Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah. Yogyakarta: BPFE.
- Batiz, F., & Batiz, L. (1994). Population and economic growth: Labour market impacts. New York: Harper Collins.
- Boediono. (2000). Ekonomi makro. Yogyakarta: BPFE.
- Froyen, R. T. (1996). Macroeconomics: Theories and policies (5th ed.). New York: Macmillan.
- Frumkin, P. (1990). Economic indicators and welfare assessment. Washington, DC: Brookings Institution.
- Irawan, P., & Suparmoko, M. (1992). Ekonomi pembangunan. Yogyakarta: BPFE.
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *American Economic Review*, 45(1), 1–28.
- Lipsey, R. G. (1995). An introduction to positive economics (8th ed.). London: Weidenfeld & Nicolson.
- Mankiw, N. G. (2007). Macroeconomics (6th ed.). New York: Worth Publishers.
- Nopirin. (2000). Ekonomi internasional. Yogyakarta: BPFE.
- Rochmat, H. (2003). Teknik location quotient dalam penentuan sektor unggulan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 18(2), 91–103.
- Samuelson, P. A. (1995). Economics (15th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Sjafrizal. (2009). Ekonomi regional: Teori dan aplikasi. Padang: Baduose Media.

- Sukirno, S. (1985). *Ekonomi pembangunan: Proses, masalah, dan dasar kebijakan*. Jakarta: LP3ES.
- Sukirno, S. (2004). *Makroekonomi: Teori pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, S. (2006). *Makroekonomi modern: Perkembangan pemikiran dari Klasik hingga Keynesian baru*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tambunan, T. T. H. (2001). *Perekonomian Indonesia: Beberapa masalah penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. P. (2000). *Economic development* (7th ed.). New York: Addison Wesley Longman.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic development* (11th ed.). Boston: Pearson Addison Wesley.
- UNDP. (1990). *Human development report*. New York: Oxford University Press.